



# Segera Sertifikatkan Asset Milik Pemerintah

■ Hasan Bisri : Programkan dan Anggarkan

*Gubernur Kalbar meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalbar dan para Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Kalbar agar serius menyelesaikan status asset milik pemerintah di lingkungan masing-masing.*



Cornelis

**Borneo Tribune, Pontianak**  
Aset-aset pemerintah baik milik pusat maupun daerah mesti menjadi perhatian serius untuk diurus kepemilikannya. Proses sertifikatnya segera diselesaikan. Hal ini urgen, karena ada korelasinya dengan opini yang akan dibe-

rikan oleh BPK," tutur Cornelis, saat memberikan sambutan pada seminar Peran BPK dan DPR dalam Mengawal Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara baru-baru ini di Hotel Mercure Pontianak.

....Ke Halaman -11





## Segera Sertifikatkan Asset Milik Pemerintah

Menurut mantan Bupati Landak dua periode ini, persoalan asset sejak dulu jadi masalah. Terlebih, kepemilikan gedung milik pemerintah.

“Dikampung banyak bangunan SD Inpres yang tak memiliki sertifikat meskipun ril fisiknya ada dan dikuasai. Nah, di Pontianak ini saja, masih banyak bangunan pemerintah yang belum memiliki sertifikat tanahnya. Masalahnya, untuk mengurus sertifikat bangunan dan tanah milik pemerintah saja betapa sulitnya, padahal bukti kepemilikan secara tertulis yang sangat erat hubungannya dengan opini yang akan diberikan BKP,” tegas Cornelis.

Kedepan, Cornelis meminta agar Kepala SKPD di lingkungan Provinsi Kalbar dan Kepala Daerah kabupaten/kota terutama yang mengelola keuangan daerah untuk memperhatikan persoalan

asset dan bukti kepemilikannya.

“Sedari awal harus direncanakan penganggarannya termasuk anggaran pembuatan sertifikatnya, jadi perlu pendataan secara lengkap,” pinta Gubernur Kalbar pertama yang pernah meraih opini WTP dari BPK RI.

Himbauan Gubernur Cornelis, ternyata mendapat respon positif kedua nara sumber. Baik Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri maupun Anggota DPR RI Kamaruddin Sjam. Keduanya, memberikan apresiasi karena Gubernur paham persoalan terkait dengan aktivitas pelaporan keuangan yang dilakukan BPK.

“Apa yang disampaikan Bapak Gubernur Tadi memang benar demikian. Dalam mengawal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara banyak indikator yang harus dipenuhi, salah satunya ke-

pemilikan asset yaitu sertifikat tanah,” jelas Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri.

Karena itu, kata Hasan Bisri, solusi yang baik terkait dengan persoalan asset milik pemerintah, yang fisiknya ada, namun bukti kepemilikannya tidak bisa diperlihatkan karena tak memiliki sertifikat, kedepan perlu di inisiasi kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional.

“Pemerintah provinsi atau kabupaten/kota perlu membuat MoU dengan BPN untuk melakukan proses pembuatan sertifikatnya. Jadi ketika melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan anggarannya bukan hanya pembangunan gedung atau fisiknya, tapi juga perlu dianggarkan pembuatan sertifikatnya. Dengan demikian, kedepan tidak menjadi masalah lagi,” jelas Hasan Bisri. (haes) □